

**INDIKATOR KINERJA KUNCI
(IKK)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

JUMLAH BELANJA PEGAWAI DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	478.369.824.473,00	443.825.422.543,02	92,78
2.	Belanja Pegawai Guru	230.001.034.181,00	226.533.528.679,00	98,49
3.	Belanja Pegawai Tenaga Kesehatan	63.734.008.200,00	59.937.138.522,02	94,04
Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		184.634.782.092,00	157.354.755.342,00	85,22

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

Liwa, 26 Februari 2025

Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00	1.066.027.122.752,77	94,32

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

Liwa, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota
2. IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)

JUMLAH BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN - TRANSFER EXPENDITURES
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	478.369.824.473,00	443.825.422.543,02	92,78
2.	Belanja Barang Jasa	264.580.882.920,00	245.883.654.304,75	92,93
Jumlah		742.950.707.393,00	689.709.076.847,77	92,83

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

Liwa, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota
2. IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)

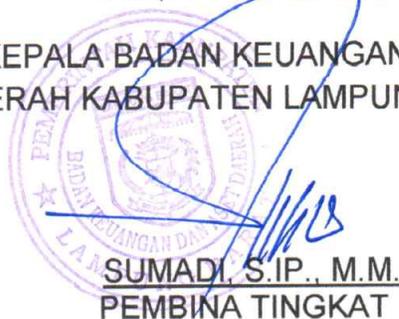
JUMLAH BELANJA APBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah	1.130.182.927.936,00	1.066.027.122.752,77	94,32

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

Liwa, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota

3. IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

OPINI LAPORAN KEUANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2014 s.d. 2024

No	Tahun	No Surat	Opini BPK	Keterangan
1.	2014	02A/LHP/XVIII.BLP/04/2014 tanggal 21 April 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2013
2.	2015	17A/LHP/XV/04/2015 tanggal 10 April 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2014
3.	2016	28A/LHP/XVIII.BLP/06/2016 tanggal 17 Juni 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2015
4.	2017	28A/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2016
5.	2018	32A/LHP/XVIII.BLP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2017
6.	2019	18A/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2018
7.	2020	19A/LHP/XVIII.BLP/05/2020 tanggal 28 Mei 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2019
8.	2021	31A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 3 Mei 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2020
9.	2022	27A/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2021
10.	2023	31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 16 Mei 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2022
11.	2024	36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Atas LKPD TA. 2023

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung)

Liwa, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.I.P., M.M.
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

1 / f

intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 02B/LHP/XVIII.BLP/05/2013 dan Nomor 02C/LHP/XVIII.BLP/05/2013.

Bandar Lampung, 3 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dra. V. M. Ambar Wahyuni, M. M., Ak.
Akuntan Register Negara No. D-5317



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2013, Realisasi Anggaran, dan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

J&

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 02B/LHP/XVIII.BLP/04/2014 dan Nomor 02C/LHP/XVII.BLP/04/2014 tanggal 21 April 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 21 April 2014
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



7 Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM, Ak., CA &
Akuntan, Register Negara No. D-5317



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap

b&

Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17B/LHP/XV/04/2015 dan Nomor 17C/LHP/XV/04/2015 tanggal 10 April 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 10 April 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dra. V. M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA. &
Akuntan, Register Negara No.11D-5317



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

kepatuhan. Dalam melakukan penitikan risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyajian dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memicing prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa hasil pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan 1.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjelaskan bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

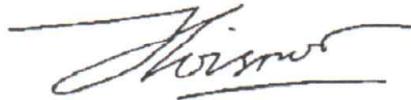
Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28B/LHP/XVIII.BLP/06/2016 dan 

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Nomor 28C/LHP/XVIII.BLP/06/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, Juni 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm. Ak²
Akuntan, Register Negara No. 11.D16934

BPK Perwakilan Provinsi Lampung



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang

material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 dan Nomor 28C/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yenny, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. 2523

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 32 A/LHP/XVIII.BLP/05/2018

Tanggal : 31 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 / Faksimile (0721) 472872



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

[Handwritten signature]

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

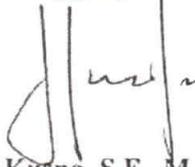
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32B/LHP/XVIII.BLP/05/2018 dan Nomor 32C/LHP/XVIII.BLP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 31 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

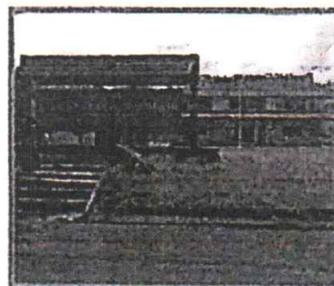
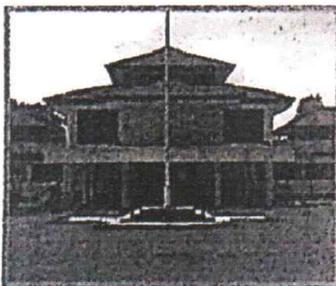

Hadi Kusno, S.E., M.M., Ak., CA. 
Register Negara Akuntan No. 4525



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 18 A/LHP/XVIII.BLP/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215, Telepon (0721) 474828 / Faksimile (0721) 472872



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18B/LHP/XVIII.BLP/05/2019 dan Nomor 18C/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 20 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Myrto Handayani, S.E., M.M., Ak., CFE, CA.
Register Negara Akuntan No. RNA 14117

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 19.A/LHP/XVIII.BLP/05/2020
Tanggal : 28 Mei 2020**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215, Telp/Fax (0721) 472872



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII.BLP/05/2020 dan Nomor 19.C/LHP/XVIII.BLP/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 28 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Hari Wiwoho, S.E., MM., Ak., CA., CSFA.
& Register Negara Akuntan No. 9796 e k

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2020

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2021
Tanggal : 3 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215, Telp/Fax (0721) 472872



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

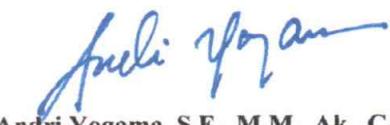
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 3 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-9383



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

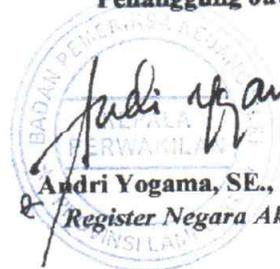
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27.B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Andri Yogama, SE., M.M., Ak., CA., CSFA. *Andri*
Register Negara Akuntan No. RNA-9383



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-22028**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

1
Df.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, oprasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yayon Hudiantoro S.E., M.AccFin., Ak., CA, CSFA
Register Negeri Akuntan No. RNA-3701



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

II. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan

TOTAL BELANJA OPERASI DAN MODAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	787.052.867.520,00	732.476.704.550,77	93,07
2.	Belanja Modal	163.892.744.934,00	155.180.317.163,00	94,68
Jumlah		950.945.612.454,00	887.657.021.713,77	93,34

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

Liwa, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

III. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	%	Realisasi Tahun N-1	Anggaran Murni Tahun N
1.	Pendapatan		1.119.418.377.234,92	1.110.660.464.574,08	99,22	985.836.203.764,84	1.091.795.802.539,00
2.	Belanja		1.130.182.927.936,00	1.066.027.122.752,77	94,32	984.409.205.393,80	1.096.792.411.919,00
Surplus/(Defisit)			(10.764.550.701,08)	44.633.341.821,31	(414,63)	1.426.998.371,04	(4.996.609.380,00)

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2024 (Data Sementara Per 31 Desember 2024), Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2023 Audited, Ringkasan APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2024

Liwa, 26 Februari 2025

Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

III. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

2. IKK Outcome : *Assets Management*

ASSETS MANAGEMENT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Hasil	Sumber Data
1.	Apakah ada Daftar Aset Tetap?	Ya/Tidak	Sistem Informasi dan Manajemen Aset (Simaset)
2.	Apakah ada manual untuk menyusun Daftar Aset Tetap?	Ya/Tidak	Kertas Kerja Penyusunan (KKP) Aset
3.	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ya/Tidak	Rekonsiliasi Aset untuk penyusunan Neraca Aset, Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah
4.	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya/Tidak	Laporan Barang Milik Daerah (LBMD), Neraca Daerah

Liwa, 26 Februari 2025

Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


SUMADI, S.IP., M.M.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
 Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

III. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

3. IKK Outcome : Cash Management : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (APBD Murni)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Uraian	Catatan	Anggaran Tahun N	Realisasi Tahun N	%	Realisasi Tahun N-1	Anggaran Murni Tahun N
1.	Pendapatan Daerah		1.119.418.377.234,92	1.110.660.464.574,08	99,22	985.836.203.764,84	1.091.795.802.539,00
	PAD		69.260.946.657,32	71.292.283.868,08	102,93	68.748.525.754,84	67.738.029.191,00
	Pendapatan Transfer		1.050.157.430.577,60	1.039.368.180.706,00	98,97	917.087.678.010,00	1.024.057.773.348,00
2.	Belanja		1.130.182.927.936,00	1.066.027.122.752,77	94,32	984.409.205.393,80	1.096.792.411.919,00
	Belanja Operasi		787.052.867.520,00	732.476.704.550,77	93,07	693.066.637.501,60	763.658.896.869,00
	Belanja Modal		163.892.744.934,00	155.180.317.163,00	94,68	117.007.426.132,00	158.744.965.868,00
	Belanja Tidak Terduga		2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	1.508.132.360,00	2.150.745.082,00
	Belanja Transfer		177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62	172.805.009.400,00	172.237.804.100,00
	Surplus/(Defisit)		(10.764.550.701,08)	44.633.341.821,31	(414,63)	1.426.998.371,04	(4.996.609.380,00)
3.	Pembiayaan						
	Penerimaan Pembiayaan		30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	48.174.340.190,04	24.915.272.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan		19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	99,997	18.918.125.240,00	19.918.662.620,00
	Pembiayaan Netto		10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01	29.256.214.950,04	4.996.609.380,00
	SILPA			55.398.457.002,39		30.683.213.321,08	0

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2024 (Data Sementara Per 31 Desember 2024), Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2023 Audited, Ringkasan APBD Kabupaten Lampung Barat TA. 2024

Liwa, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.IP., M.M.
 PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Informasi tentang Sumber Daya Yang Tersedia untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK UNIT PELAYANAN
DAPAT DIAKSES DI WEBSITE PEMDA

No	Unit Pelayanan	Anggaran	Realisasi	%	Alamat Portal
1.	Website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	303.800.000,00	302.601.000,00	99,61	https://lampungbaratkab.go.id/
2.	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	98.525.000,00	68.014.095,00	69,03	https://sipd.kemendagri.go.id/
3.	Sistem Informasi dan Manajemen Aset (Simaset)	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	https://linktr.ee/asetlambar http://36.91.222.101/asetlambar/app
4.	Pajak Mandiri Sistem Aplikasi Non Tunai (PM Santun)	65.000.000,00	64.579.800,00	99,35	https://pmsantun.lampungbaratkab.my.id:8000/
5.	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Lampung Barat	84.557.000,00	84.545.775,00	99,99	https://jdih.lampungbaratkab.my.id
6.	Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunan Online (SIAPP Online)	30.000.000,00	30.000.000,00	100	https://adbang.lampungbaratkab.go.id/
7.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	77.840.600,00	76.177.903,00	97,86	https://lpse.lampungbaratkab.go.id/
8.	Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP Lampung Barat)	15.000.000,00	15.000.000,00	100	https://pmptsp.lampungbaratkab.go.id/
9.	Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sipakis Hebat)	30.000.000,00	29.637.000,00	98,79	https://sipakishebat.lampungbaratkab.go.id/home/auth/login
10.	Sistem Administrasi Kepegawaian Elektronik (Sinetron)	22.660.000,00	22.046.500,00	97,29	https://sinetron.lampungbaratkab.go.id/
11.	Tourist Information Centre (TIC)	35.646.000,00	34.146.120,00	95,79	https://tic.lampungbaratkab.go.id/
12.	Sistem Penghitungan Cepat (SiTepat)	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	https://sitepat.lampungbaratkab.go.id/
13.	Sistem Aplikasi Pelayanan Pasien Puskesmas (ePuskesmas)	180.000.600,00	180.000.000,00	100	https://lampungbarat.epuskesmas.id/
Jumlah		1.093.029.200,00	1.056.548.193,00	96,66	

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

Liwa, 26 Februari 2025

Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.P., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

2. IKK Outcome : Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah (*Public Access to Fiscal Information*)

AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI KEUANGAN DAERAH
(PUBLIC ACCESS TO FISCAL INFORMATION)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Jenis Dokumen	Alamat Portal	Perangkat Daerah	Ket
1.	Ringkasan RKA seluruh Perangkat Daerah	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/09/23/laporan-rka-skpd-tahun-2024/	Seluruh Perangkat Daerah	-
2.	Ringkasan RKA PPKD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/09/23/laporan-rka-ppkd-tahun-2024/	BKAD	-
3.	Raperda APBD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/08/19/rancangan-perda-tentang-apbd-tahun-2024/	BKAD	-
4.	Raperda Perubahan APBD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/07/08/rancangan-perda-tentang-apbd-perubahan-tahun-2024/	BKAD	-
5.	Perda APBD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/01/15/perda-nomor-6-tahun-2023/	BKAD	-
6.	Perda Perubahan APBD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/08/19/perda-nomor-3-tahun-2024/	BKAD	-
7.	Ringkasan DPA seluruh Perangkat Daerah	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/09/23/laporan-dpa-skpd-tahun-2024/	Seluruh Perangkat Daerah	-
8.	Ringkasan DPA PPKD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/09/23/ringkasan-dpa-ppkd-2024/	BKAD	-
9.	LRA seluruh Perangkat Daerah	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/07/15/lra-skpd-tahun-2023/	Seluruh Perangkat Daerah	-
10.	LRA PPKD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/07/15/lra-ppkd-tahun-2023/	BKAD	-
11.	LKPD yang sudah diaudit	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/05/06/laporan-keuangan-kabupaten-lampung-barat-tahun-2023/	BKAD	-
12.	Opini atas LKPD	https://lampungbaratkab.go.id/home/2024/05/07/laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-tahun-2023/	BKAD	-

Liwa, 26 Februari 2025

Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007

CATEGORY: RKA PERANGKAT DAERAH



LAPORAN RKA SKPD TAHUN 2024

Posted by udmeab | Sep 22, 2024 | RKA Perangkat Daerah | Kabupaten Lampung Barat
Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024

[READ MORE](#)



RINGKASAN RKA SKPD TAHUN 2023

Posted by udmeab | Jul 15, 2024 | RKA Perangkat Daerah | Kabupaten Lampung Barat
Ringkasan RKA SKPD tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat
Download RKA SKPD

[READ MORE](#)



RKA SKPD TAHUN 2022

Posted by udmeab | Feb 10, 2021 | RKA Perangkat Daerah | Kabupaten Lampung Barat
Laporan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat

[READ MORE](#)

SEARCH ...

POS-POS TERBARU

Pengumuman Pembentukan Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Lampung barat dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Majukan Percekonian UMKM, Pj Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honoror Lambar Jangan Takut Laporkan Jika Ada Indikasi Data Situman

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHL5

Eric Enrico - Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj Bupati Nukman.

eric enricon - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tanah III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023.

CATEGORY: RKA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



LAPORAN RKA PPKD TAHUN 2024

Posted by admin on 1 Sep 2024 | RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | [View Article](#)
Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

[READ MORE](#)



LAPORAN RKA PPKD TAHUN 2023

Posted by admin on 1 Jul 2024 | Perencanaan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | [View Article](#)
Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tahun 2023 Kabupaten Lampung

[READ MORE](#)



RKA PPKD TAHUN 2022

Posted by admin on 1 Nov 2021 | RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | [View Article](#)
Laporan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 - Download RKA PPKD

[READ MORE](#)

SEARCH

POS-POS TERBARU

Pengumuman Pembentukan Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Majukan Perekonomian UMKM, Pj Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau

Wasisno Minta Honoror Lambar Jangan Takut Laporkan jika Ada Indikasi Data Siluman

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj. Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

Eric Enrico - Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj. Bupati Nukman.

eric enrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023

CATEGORY: RANCANGAN PERDA TENTANG APBD



RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN 2024

Posted by admin | 14 Aug 2024 | Rancangan Perda tentang APBD
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

[READ MORE](#)



PERDA NOMOR 6 TAHUN 2023

Posted by admin | 1 Jan 2024 | Peraturan Rancangan Perda tentang APBD
Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran.

[READ MORE](#)



PERATUFAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023

Posted by admin | 20 Dec 2023 | Peraturan Rancangan Perda tentang APBD
Perda no. 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

[READ MORE](#)

SEARCH

POS-POS TERBARU

Pengumuman Pembentukan Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Lampung barat dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Majukan Perekonomian UMKM, Pj Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisto Minta Honoror Lambar Jangan Takut Laporkan Jika Ada Indikasi Data Siluman

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj. Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

Eric Enrico - Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj. Bupati Nukman.

ericenrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap II PPD Tingkat Nasional Tahun 2023

CATEGORY: RANCANGAN PERUBAHAN APBD



PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024

Posted by idmweb | 1 Aug 19, 2024 | Perencanaan | Rancangan Perubahan APBD | 0 views | 0 likes
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

READ MORE



RANCANGAN PERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Posted by idmweb | 1 Jul 8, 2024 | Perencanaan | Rancangan Perubahan APBD | 0 views | 0 likes
Dokumentasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Download

READ MORE



RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023

Posted by idmweb | Feb 13, 2024 | Perencanaan | Rancangan Perubahan APBD | 0 views | 0 likes
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023. Download Perda Rancangan

READ MORE

SEARCH

POS-POS TERBARU

Pengumuman Pembentukan Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Lampung barat dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Majukan Perekonomian UMKM, Pj Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan beta sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honoror Lambar Jengen Takut Laporken Jika Ada Indikasi Data Siluman

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico | Pj Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

Eric Enrico | Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj. Bupati Nukman.

eric enrico | Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023.

CATEGORY: DPA PERANGKAT DAERAH



LAPORAN DPA SKPD TAHUN 2024

Posted by admin on 15 Sep 2024 | DPA Perangkat Daerah | 0 views
Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun...

READ MORE



LAPORAN DPA PPKD TAHUN 2023

Posted by admin on 04 Nov 2024 | DPA Perangkat Daerah | 0 views
Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - Download DPA PPKD

READ MORE



DPA SKPD TAHUN 2022

Posted by admin on 04 Nov 2022 | DPA Perangkat Daerah | 0 views
DPA SKPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 - Download DPA SKPD

READ MORE

SEARCH

POS-POS TERBARU

Pengumuman Pembentukan Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Majukan Perekonomian UMKM, Pj. Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj. Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honoror Lambar Jangan Takut Laporkan Jika Ada Indikasi Data Situman

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj. Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

Eric Enrico - Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj. Bupati Nukman.

eric enrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023.

CATEGORY: DPA PEJABAT KEUANGAN PERANGKAT DAERAH



RINGKASAN DPA PPKD 2024

Posted by admin on 11 Feb 2024 | 0 Comments | 0 Likes | 0 Shares
Dokumen Ringkasan DPA PPKD tahun anggaran 2024. Download DPA PPKD.

READ MORE



DPA PPKD TAHUN 2022

Posted by admin on 10 Jan 2023 | 0 Comments | 0 Likes | 0 Shares
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022. Download DPA PPKD.

READ MORE



DPA PPKD 2021

Posted by admin on 08 Des 2020 | 0 Comments | 0 Likes | 0 Shares
Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tahun anggaran 2021.

READ MORE

SEARCH ...

POS-POS TERBARU

Pengumuman Pembentukan Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Lampung barat dan Provinsi Lampung Tahun 2025

Majukan Perekonomian UMKM, Pj Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warga yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honoror Lambar Jangan Takut Laporkan Jika Ada Indikasi Data Siluman

KOMENTAR TERBARU

eric enrico - Pj Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

eric enrico - Pengurus DPC APJI Lambar Resmi Dikukuhkan Pj Bupati Nukman.

eric enrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023.

CATEGORY: REALISASI ANGGARAN SELURUH SKPD



LRA SKPD TAHUN 2023

Posted by admin on 30/10/2024 | Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD | 0 views

Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD tahun 2023 - Download LRA SKPD

READ MORE



LRA SKPD TAHUN 2022

Posted by admin on 12/09/2023 | Realisasi Anggaran seluruh SKPD | 0 views

Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD tahun 2022 - Download LRA SKPD

READ MORE



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SELURUH SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Posted by admin on 01/08/2022 | Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD | 0 views

Kabupaten Lampung Barat - Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD Kabupaten Lampung

READ MORE

SEARCH

POS-POS TERBARU

Majukan Peresmian UMKM, Pj. Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj. Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honorar Lambar Jangan Takut Laporkan jika Ada Indikasi Data Siluman

Dukung Swasembada Pangan 2025, Pj Bupati Nukman Lakukan Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar.

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj. Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

Eric Enrico - Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj. Bupati Nukman.

eric enrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

CATEGORY: REALISASI ANGGARAN SELURUH PPKD



LRA PPKD TAHUN 2023

Filed by admin on 10/10/2023 - Laporan Realisasi Anggaran seluruh PPKD Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran PPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - Download LRA PPKD

[READ MORE](#)



LRA PPKD TAHUN 2022

Filed by admin on 09/09/2023 - Realisasi Anggaran seluruh PPKD Tahun 2022

Laporan Realisasi Anggaran PPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 - Download LRA PPKD

[READ MORE](#)



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SELURUH PPKD TAHUN ANGGARAN 2021

Filed by admin on 01/08/2023 - Laporan Realisasi Anggaran seluruh PPKD Tahun 2021

Kabupaten Lampung Barat - Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD Kabupaten Lampung

[READ MORE](#)

SEARCH

POS-POS TERBARU

Majukan Perekonomian UMKM, Pj Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honorar Lambar Jangan Takut Laporkan jika Ada Indikasi Data Siluman

Dukung Swasembada Pangan 2025, Pj Bupati Nukman Lakukan Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar.

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHLS

Eric Enrico - Pengurus DPC APJI Lambar Resmi Dikukuhkan Pj Bupati Nukman.

eric enrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap III PPD Tingkat Nasional Tahun 2023

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

CATEGORY: LAPORAN



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2023

Posted by adminweb | May 7, 2024 | Laporan | 0 Comments
Informasi: Laporan BPK tentang Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - Download Cetak

[READ MORE](#)



LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

Posted by adminweb | May 6, 2024 | Laporan | 0 Comments
Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2023 - Download LK Lampung Barat

[READ MORE](#)



CALK TAHUN 2023

Posted by adminweb | May 6, 2024 | Laporan | 0 Comments
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - Download Calk

[READ MORE](#)

SEARCH ...

POS-POS TERBARU

Majukan Perekonomian UMKM, Pj. Bupati Nukman Resmikan Gedung PLUT.

Pastikan Kondisi Kendaraan Prima, Pj. Bupati Nukman Lakukan Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas

Pj Bupati Lambar Nukman sampaikan bela sungkawa terhadap warganya yang tewas diterkam harimau.

Wasisno Minta Honorrer Lambar Jangan Takut Laporkan jika Ada Indikasi Data Siluman

Dukung Swasembada Pangan 2025, Pj Bupati Nukman Lakukan Penanaman Jagung Serentak Satu Juta Hektar.

KOMENTAR TERBARU

Eric Enrico - Pj. Bupati Lambar Buka kegiatan konsultasi publik dalam rangka KHL5

Eric Enrico - Pengurus DPC APJ Lambar Resmi Dikukuhkan Pj. Bupati Nukman.

eric enrico - Pemkab Lambar Ikuti Penilaian Tahap II PPD Tingkat Nasional Tahun 2023.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows